

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tidak pernah lepas dari suatu wilayah. Berbagai macam kebijakan dikerahkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dikarenakan kemiskinan yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan di suatu wilayah. Masalah kemiskinan ini harus dihadapi secara serius dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), kemiskinan dipandang sebagai kegagalan finansial untuk memenuhi kebutuhan penting pangan (*basic needs approach*) dan non-makanan jika diperkirakan dari sisi penggunaan.

Istilah kemiskinan bermula Ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, serta dianggap tingkat kemakmurannya masih dibawah standar hidup tertentu. Kurangnya kesejahteraan membuat angka orang miskin semakin bertambah, dengan dikaitkannya kepunyannya atau hak untuk barang, pendapatan yang rendah dan konsumsi rumah tangga yang mulai berkurang membuat mereka masih terjebak dalam kemiskinan (L. nur Sari & Nuraini, 2020).

Saat ini, kemiskinan masih menjadi topik perbincangan khusus di berbagai negara, khususnya negara-negara yang masih berkembang. Salah satu negara yang masih berkembang adalah Indonesia. Di Indonesia

kemiskinan sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, yang dimana sudah ada sejak Indonesia terbentuk. Badan Pusat Statistik (2023) mengategorikan penduduk sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran dibawah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, jika dibawah itu maka sudah tergolong dalam penduduk miskin.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah wabah Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebar melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit Covid-19 (WHO, 2020). Wabah Covid-19 berlangsung sekitar tiga tahun sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2021, pada tahun tersebut fenomena Covid-19 menjadi kekhawatiran dunia karena Indonesia mengalami tantangan ekonomi dan kepercayaan. Artinya ada dampak yang diperoleh dari pandemi Covid-19 baik negatif maupun positif oleh seluruh masyarakat Indonesia (Nasution et al., 2020). Hal ini yang menyebabkan terjadinya kekacauan perekonomian di Indonesia seperti meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, terjadinya kesenjangan Upah Minimum karena banyak PHK yang terjadi, menurunnya Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi, dan meningkatnya Pengeluaran Pemerintah yang ada kaitannya dengan tingkat

kemiskinan. Meskipun demikian, pandemi ini juga telah memicu peningkatan kerja sama di antara negara-negara G20 untuk mengatasi dampak ekonominya.

Penduduk sebagai penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan terus mengalami lonjakan ketika wabah Covid-19 terjadi. (Khan et al., 2020) menyimpulkan bahwa Covid-19 sangat mematikan dan mempengaruhi negara maju dan berkembang. Negara maju dapat memiliki strategi perawatan kesehatan yang lebih baik untuk mengatasi Covid-19, sementara negara berkembang, seperti negara Asia, sulit menemukan cara untuk menghindarinya, karena kurangnya akses fasilitas dasar dan memiliki kejadian pneumonia biasa, yang menyebabkan angka kematian yang tinggi meskipun tersedia pengobatan dan vaksinasi. Sehingga membuat situasi ini lebih rentan di negara berpenghasilan rendah. Hal ini yang membuat tingkat kemiskinan terus menjadi masalah yang serius di negara berkembang terutama Negara Indonesia.

Indonesia memberikan perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan. Dalam UU No. 11 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi kriteria masalah sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemiskinan juga dijelaskan dalam Perpres RI No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan

memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini dapat diartikan bahwa kemiskinan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah atau suatu negara.

Sebagaimana tertera dalam islam yang telah menurunkan nilai-nilai mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Q.S Ar-Rum [30/84]: 38 yang berisi sebagai berikut:

مَقَاتِ ذَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ٣٨

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada sanak saudara dekatmu, begitu pula orang miskin dan orang yang membutuhkan. Itulah yang terbaik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah yang beruntung.” (Q.S Ar-Rum [30/84]: 38)

Tabel 1. 1
Tingkat Kemiskinan Masing-masing Pulau di Indonesia
Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1.	Sumatera	5.919.3	5.772.4	6.066.2	5.862.7	5.763.4	29.384.0
2.	Jawa	13.190.2	12.555.9	14.752.0	14.023.5	13.936.6	68.458.3
3.	Bali dan Nusa Tenggara	2.038.1	1.992.1	1,116.5	2.111.0	2.099.2	9.356.9
4.	Kalimantan	1.000.2	961.5	1,016.1	975.4	995.9	4.949.1
5.	Sulawesi	2.025.2	1.988.8	2,061.5	2.007.1	2.030.7	10.113.2
6	Maluku dan Papua	1.528.7	1.515.2	1,537.4	1.541.9	1.537.5	7.660.7
	Indonesia	25.674.6	24.785.9	27.549.7	26.503.7	26.161.2	130.675.0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, dari keenam pulau di Indonesia 5 tahun terakhir dengan Tingkat Penduduk Miskin tertinggi adalah Pulau Jawa

dengan Tingkat Penduduk Miskin sebesar 68.458.300 ribu jiwa. Kemudian diikuti Pulau Sumatera sebesar 29.384.000 ribu jiwa, lalu Pulau Sulawesi sebesar 10.113.200 ribu jiwa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 9.356.900 ribu jiwa dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 7.660.700 ribu jiwa. Sedangkan pulau dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Pulau Kalimantan dengan persentase penduduk miskin sebesar 4.949.100 ribu jiwa.

Salah satu pulau di Indonesia yang mempunyai permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi adalah Pulau Jawa yang merupakan pulau terbesar di Indonesia, pulau jawa memiliki peran yang penting dalam Pembangunan ekonomi dan sosial di negara Indonesia. Namun, di samping potensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa juga memiliki tantangan serius dalam hal pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, selama periode 2018-2022 tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mengalami fluktuasi. Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Jawa masih menangani permasalahan tersebut dengan serius. Karena berdasarkan Tabel 1.1, Pulau Jawa menjadi wilayah kemiskinan tertinggi di Indonesia periode lima tahun terakhir atau 2018-2022. Akibatnya, pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa dinilai masih memperhatikan. Berikut tabel yang memperlihatkan Tingkat kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1. 2
Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Banten	668.7	641.4	857.6	852.2	829.6	769.9
2	DKI Jakarta	372.2	362.3	496.8	498.2	494.9	444.9
3	Jawa Barat	3.539.4	3.375.8	4.188.5	4.004.8	4.053.6	3.832.4
4	Jawa Tengah	3.867.4	3.679.4	4.119.9	3.934.0	3.858.2	3.891.7
5	Jawa Timur	4.292.1	4.056.0	4.585.9	4.259.6	4.236.5	4.286.0
6	DI Yogyakarta	450.2	440.8	503.1	474.4	463.6	466.4
Pulau Jawa		13.190.2	12.555.9	14.752.0	14.023.5	13.936.5	13.691.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi tingkat kemiskinan lima tahun terakhir pada masing-masing Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2022 ada pada Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 4.286.046 ribu jiwa. Lalu pada urutan kedua disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 3.891.798 ribu jiwa. Dilanjut Provinsi Jawa Barat 3.832.458 ribu jiwa, Provinsi Banten sebesar 769.948 ribu jiwa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 466.480 ribu jiwa. Urutan terakhir adalah rata-rata tingkat kemiskinan terendah yang terdapat pada DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 444.924 ribu jiwa.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat kebijakan tentang program-program pengentasan kemiskinan. Pembuatan kebijakan ini tentunya disesuaikan pada setiap wilayah yang nantinya akan diterapkan pada setiap daerah. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawati & Setiawan, 2012), memperlihatkan hasil yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan, laju

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkata kerja, dan alokasi bantuan langsung masyarakat merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tingkat penduduk miskin di Jawa Timur.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu rendahnya tingkat upah, tingginya tingkat pengangguran, dan IPM yang masih kurang (Ningrum, 2017). Upah merupakan turunan dari teori produksi $Q = f(K,L)$, dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja, sebagai faktor penting dalam komponen produksi, seringkali dipengaruhi oleh besar kecilnya upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Upah merupakan sumber pendapatan, dengan kata lain upah adalah bayaran atas sesuatu yang telah dikerjakan oleh seseorang. Tingkat kemiskinan juga dapat berpengaruh jika sumber penghasilan rendah atau cenderung stagnan, hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan. Kesejahteraan pekerja akan meningkat dengan pendapatan yang tinggi karena mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan terhindar dari garis kemiskinan.

Untuk menentukan besaran gaji yang harus dibayarkan kepada pegawainya, pemilik usaha dan pelaku industri lainnya menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP). Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan menegaskan upah minimum, yang didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap sesuai Keputusan Menteri No. 1 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 dan

biasanya standar upah minimum berlaku selama satu tahun. Karena kebutuhan pokok dan kebutuhan yang dapat diterima tidak dipenuhi secara merata di setiap daerah, maka besaran minimum tersebut dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam penelitian (Wasono et al., 2020) Upah Minimum Provinsi dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Untuk itu pendapatan harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan di setiap masing-masing pemerintah daerah. Dengan meningkatnya Upah Minimum Provinsi maka semakin Sejahtera masyarakat di daerah tersebut. Dalam UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang isinya bahwa semua pekerja baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap, serta yang masih dalam masa percobaan harus di bayar dengan layak berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Demi menjaga kestabilan perekonomian tingkat upah biasanya memiliki standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Agustin et al., 2019) UMP menjadi sesuatu hal yang penting, baik bagi untuk tenaga kerja maupun bagi pemerintah, karena hal ini akan menyangkut pada kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Dalam menetapkan besarnya upah tenaga kerja, perusahaan dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Berikut ini adalah tabel Rata-rata Upah Minimum Provinsi masing-masing Pulau di Indonesia:

Tabel 1. 3
Upah Minimum Provinsi Masing-masing Pulau di Indonesia
Tahun 2018-2022 (Rupiah)

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Sumatera	2.353.7	2.542.7	2.759.1	2.769.4	2.897.7	2.664.5
2	Jawa	1.956,8	2.113.9	2.293.8	2.353.3	2.421.6	2.227.9
3	Bali dan Nusa Tenggara	1.870.7	2.035.1	2.209.2	2.209.2	2.233.0	2.111.5
4	Kalimantan	2.405.2	2.607.9	2.832.4	2,832.4	2.858.9	2.707.4
5	Sulawesi	2.335.7	2.525.2	2.789.6	2.800.0	2.842.8	2.658.7
6	Maluku dan Papua	2.552.5	2.771.0	2.994.4	2.994.4	3.060.8	2.874.6
	Indonesia	2.268.8	2.455.6	2.672.3	2.687.7	2.758.8	2.568.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.3 memperlihatkan angka upah minimum pada masing-masing Pulau yang berada di Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022 atau lima tahun terakhir. Di beberapa Pulau memperlihatkan angka yang cenderung stagnan di dua tahun berturut-turut hal ini dikarenakan sempat terjadi wabah penyakit Covid-19, tetapi setelah itu menunjukkan kenaikan pada tahun berikutnya. Dalam pemberian upah di suatu wilayah harus mempertimbangkan komponen biaya hidup, misalnya, biaya hidup di kota besar biasanya lebih tinggi dibandingkan di kota kecil atau desa. Sebagai contoh, Pulau Maluku dan Papua menunjukkan rata-rata upahan minimum tertinggi diantara pulau lainnya yang ada di Indonesia, yaitu menginjak angka 3.060.869 rupiah pada tahun 2022, dan dengan rata-rata lima tahun sebesar 2.874.662 rupiah.

Kemiskinan diperburuk tidak hanya oleh rendahnya upah minimum tetapi juga oleh tingginya tingkat pengangguran. Karena peningkatan angka pengangguran menunjukkan bahwa banyak orang tidak produktif dan tidak

mempunyai pendapatan, maka orang-orang tersebut akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingginya angka pengangguran tidak dapat dipisahkan dari permasalahan terbatasnya prospek lapangan kerja, kurangnya lapangan kerja yang tersedia, dan kualitas sumber daya manusia yang relatif buruk, yang mengakibatkan ketidakmampuan bekerja dan sulitnya menciptakan lapangan kerja. Alasan penulis penelitian ini menggunakan variabel tingkat pengangguran terbuka adalah karena pengangguran terbuka mengacu pada mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang sudah pada dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali, meskipun mereka telah berupaya keras untuk mendapatkannya. Apalagi ketika adanya wabah Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 apakah mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dapat mendapatkan pekerjaan ketika wabah Covid-19 melanda.

Dalam penelitian (Y. A. Sari, 2021) mengutarakan bahwa Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Hal ini sesuai pada hasil penelitian (Purboningtyas et al., 2020) yang memperlihatkan hasil jika tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan pada suatu wilayah atau daerah. Berikut ini adalah tabel data tingkat pengangguran terbuka pada masing-masing Pulau di Indonesia dalam persen.

Tabel 1. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Masing-masing Pulau di Indonesia
Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Sumatera	2.15	4.97	6.17	5.69	5.33	4.86
2	Jawa	5.80	3.57	8.16	7.26	6.45	6.25
3	Bali dan Nusa Tenggara	2.70	2.66	4.71	4.05	3.74	3.57
4	Kalimantan	4.92	4.60	5.39	5.34	4.83	5.02
5	Sulawesi	4.35	4.00	4.94	4.43	4.23	4.39
6	Maluku dan Papua	5.39	5.36	5.95	5.20	4.77	5.33
Indonesia		4.02	4.34	6.03	5.49	5.05	4.99

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.4 memperlihatkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka masing-masing Pulau di Indonesia dari tahun 2018 - 2022 dengan satuan yang digunakan persen. Dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir terdapat di Pulau Jawa dengan rata-rata selama lima tahun yaitu 6,25%. Selain itu dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka terendah di Indonesia terdapat di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan rata-rata selama lima tahun adalah 3,57%.

Tingginya kemiskinan disebabkan tingginya angka pengangguran, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kekurangan lapangan pekerjaan, termasuk juga disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk konsumsi, karena pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang dapat dijadikan tolak ukur untuk kesejahteraan hidupnya. Umumnya orang yang berpenghasilan lebih cenderung akan mengeluarkan lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa

seseorang agar keluar dari kemiskinan tergantung dari jumlah pengeluarannya dalam memenuhi kebutuhan pokok, karena semakin tinggi pengeluaran seseorang maka akan semakin sejahtera dan berkualitas hidupnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sayifullah & Gandasari, 2016) dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Pada penelitian (Ristika et al., 2021) menghasilkan bahwa Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, jika IPM meningkat maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur akan turun, demikian sebaliknya. Berikut ini adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Pulau di Indonesia.

Tabel 1. 5
Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Pulau di Indonesia
Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Sumatera	71.18	71.79	71.93	72.07	65.31	70.45
2	Jawa	74.19	74.74	74.81	75.13	75.71	74.92
3	Bali dan Nusa Tenggara	68.82	69.58	69.65	69.87	70.60	69.70
4	Kalimantan	70.79	71.41	71.30	71.70	72.27	71.49
5	Sulawesi	69.23	69.93	70.11	70.40	70.98	70.13

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
6	Maluku dan Papua	65.11	65.92	65.88	66.09	66.74	65.95
	Indonesia	70.39	71.04	71.11	71.36	69.81	70.74

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.5 memperlihatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing Pulau di Indonesia dari tahun 2018-2022 dengan satuan persen. Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dengan rata-rata 74,92% selama lima tahun terakhir. Dapat dilihat pula pada tabel diatas bahwa Indeks Pembangunan Manusia terendah di Indonesia terdapat di Pulau Maluku dan Papua dengan rata-rata 65,95% selama lima tahun terakhir.

Akan tetapi jika diamati kembali pada tahun 2018-2022 rata-rata persentase Indeks Pembangunan Manusia masing-masing pulau di Indonesia terdapat beberapa pulau yang berada di kategori rendah hingga sedang dengan persentase dibawah total rata-rata IPM lima tahun terakhir yaitu 65,95%, yang mana artinya Indeks Pembangunan Manusia di beberapa pulau masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dan begitu jelas antara pulau yang ada di Indonesia, melihat hal tersebut seperti tinggi rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas, pendapatan dan harapan hidup masyarakat saat lahir, dirasa masih perlu adanya kebutuhan untuk memajukan pembangunan manusia khususnya di Pulau Jawa.

Untuk meningkatkan produktivitas dalam mengelola sumber daya daerah diperlukan investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan

pengembangan sumber daya manusia. Investasi fisik tercermin dalam besaran nilai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. Persebaran besaran investasi yang tidak merata akan berdampak kepada tidak meratanya pendapatan antar sektor terutama di daerah pedesaan, hal ini akan berdampak pada terhambatnya kegiatan perekonomian karena tidak didukung oleh investasi yang memadai seperti faktor modal fisik, rendahnya kapasitas dan keahlian penduduk dan rendahnya investasi netto. Secara keseluruhan yang mempengaruhi banyaknya investasi ada dua yaitu suku bunga dan Marginal Efficiency of Capital (MEC). MEC menyatakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal, sedangkan suku bunga adalah tingkat harga dari uang, yaitu berapa persenkah dari sejumlah uang tertentu, yang harus dikembalikan atau dibayarkan karena dipakainya uang itu. Kedua kekuatan itu yakni MEC dan suku bunga merupakan dua kekuatan yang senantiasa tarik-menarik serta saling berpengaruh dalam menentukan banyaknya investasi (Rosyidi, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2022) mengutarakan bahwa adanya realisasi investasi PMDN ini akan menekan angka tingkat kemiskinan di provinsi Banten. Investasi juga merupakan salah satu indikator yang dapat mengurangi ekspansi ekonomi di provinsi Banten. Dengan adanya investasi penanaman modal dalam negeri juga bisa saling menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyawan et al., 2017) hasil

penelitiannya menghasilkan bahwa Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang artinya semakin tinggi investasi maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan Investasi PMDN pulau yang ada di Indonesia.

Tabel 1. 6
Investasi PMDN Masing-masing Pulau di Indonesia
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Sumatera	483.9	10.162.5	11.162.3	10.692.4	12.913.6	9.083.0
2	Jawa	2.840.9	2.579.3	35.741.8	37.878.4	48.989.8	25.606.1
3	Bali dan Nusa Tenggara	451.5	274.5	5.014.5	6.396.1	6.830.9	3.793.5
4	Kalimantan	390.8	426.2	9.088.0	12.445.4	15.074.4	7.485.0
5	Sulawesi	387.3	582.8	3.535.1	4.050.2	4.391.9	2.589.5
6	Maluku dan Papua	447.5	507.1	1.446.1	1.787.1	1.869.2	1.211.4
	Indonesia	862.0	3.693.6	12.163.3	13.148.8	16.257.9	9.225.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.6 memperlihatkan angka Investasi PMDN masing-masing Pulau di Indonesia dari tahun 2018 – 2022, dengan menggunakan satuan Juta Rupiah. Dapat dilihat pada tabel bahwa Investasi PMDN terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dengan rata-rata lima tahun terakhir yaitu 25.606.100 juta rupiah. Dapat dilihat pula pada tabel bahwa tingkat Investasi PMDN terendah di Indonesia terdapat di Pulau Maluku dan Papua dengan rata-rata selama lima tahun terakhir adalah 1.211.420 juta rupiah.

Kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Investasi memiliki peran besar dalam menumbuhkan perekonomian di

daerah karena multiplier efek dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Hastin & Siswadhi, 2021).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran (Rahmah et al., 2015).

Dalam penelitian (Goni et al., 2022) mengutarakan bahwa wujud nyata dari adanya campur tangan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan adalah dengan adanya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Susunan pengeluaran pemerintah daerah disusun dengan mengaitkan penerimaan daerah dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga ada pada penelitian (Khamilah, 2019) yang menghasilkan Pengeluaran pemerintah terbukti mempunyai hubungan negatif dan signifikan. Artinya, semakin besar pengeluaran pemerintah, maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Disisi lain, kemiskinan adalah kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan dari

taraf kebutuhan hidup mereka. Seperti halnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan, maka disinilah peran pemerintah melalui pengeluarannya dapat memberikan jalan berupa pelayan umum yang lebih mudah kepada masyarakat miskin. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan Pengeluaran Pemerintah masing-masing pulau yang ada di Indonesia.

Tabel 1. 7
Pengeluaran Pemerintah Masing-masing Pulau di Indonesia
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Pulau	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Sumatera	75.294	72.826	71.056	73.420	61.927	70.905
2	Jawa	193.538	175.163	169.500	182.700	139.578	172.096
3	Bali dan Nusa Tenggara	17.095	17.556	17.315	17.618	16.671	17.251
4	Kalimantan	31.616	32.174	29.701	30.641	31.145	31.055
5	Sulawesi	25.566	27.169	26.838	27.380	21.542	25.699
6	Maluku dan Papua	27.832	28.699	28.216	29.053	13.669	25.494
	Indonesia	370.944	353.590	342.627	360.814	284.535	342.502

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.7 menunjukkan angka Pengeluaran Pemerintah masing-masing Pulau di Indonesia dari tahun 2018 - 2022 dengan satuan Juta Rupiah. Dapat dilihat pada tabel bahwa Pengeluaran Pemerintah terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dengan rata-rata lima tahun terakhir yaitu 172.096.231 Juta Rupiah. Dapat dilihat pula pada tabel bahwa tingkat Pengeluaran Pemerintah terendah di Indonesia terdapat di Pulau Maluku dan Papua dengan rata-rata selama lima tahun terakhir adalah 25.494.292 Juta Rupiah.

Pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur skala kegiatan pemerintah yang didanai pemerintah. Semakin banyak aktivitas pemerintah, semakin tinggi pengeluaran publik. Pengeluaran publik pada dasarnya “dapat dikonsumsi”. Artinya, pembelian barang dan jasa ekonomis yang dapat dikonsumsi langsung atau diproduksi untuk barang lain (Sangkaen et al., 2019).

Penelitian ini melanjutkan untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa. Apakah peran pemerintah dapat mengatasi kemiskinan di Pulau Jawa. Sehubungan dengan variabel yang digunakan oleh peneliti maka muncul pertanyaan apakah perkembangan Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa. Oleh karena itu peneliti memilih judul **“ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INVESTASI PMDN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
4. Bagaimana pengaruh Investasi PMDN terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
5. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
6. Bagaimana kondisi perekonomian Pulau Jawa saat pandemi covid-19.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh Investasi PMDN terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
6. Untuk menganalisis kondisi perekonomian Pulau Jawa saat pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan informasi dan masukan khususnya kepada Pemerintah yang ada di Pulau Jawa dalam penanggulangan kemiskinan untuk terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan kepada BPS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
3. Dapat memberikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan.